

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1.1. Teori Legitimasi

Teori legitimasi mengatakan bahwa perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya telah disesuaikan dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat sekitar perusahaan (Nasi J *et al*, 1997). Berdasarkan teori tersebut pengungkapan CSR dan lingkungan oleh perusahaan merupakan salah satu langkah untuk mendapatkan pengakuan sosial dari masyarakat sekitar, maka keberlanjutan sebuah perusahaan dapat terjaga karena entitas telah melaksanakan norma yang berlaku (Anggraeni, 2015).

Teori legitimasi merupakan perspektif teori yang berada dalam kerangka teori ekonomi politik. Karena pengaruh masyarakat luas dapat menentukan alokasi sumber keuangan dan sumber ekonomi lainnya, perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan untuk membenarkan atau melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat.

Legitimasi dapat memberikan mekanisme yang kuat dalam memahami pengungkapan sukarela untuk lingkungan dan sosial yang dilakukan oleh perusahaan, dan pemahaman ini yang nantinya akan mengarah ke debat public yang kritis, lebih jauh lagi teori legitimasi menunjukan kepada peneliti dan masyarakat luas jalan untuk lebih peka terhadap isi pengungkapan perusahaan. Praktek corporate social responsibility yang dilakukan perusahaan mempunyai tujuan untuk menyelaraskan diri dengan norma masyarakat. Dengan adanya pengungkapan corporate social responsibility yang baik, maka diharapkan perusahaan akan

mendapat legitimasi dari masyarakat sehingga dapat meningkatkan kinerja yang bertujuan untuk mencapai keuntungan perusahaan.

Dowling dan Pfeffer mengatakan: “Legitimasi merupakan hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan”. Norma perusahaan selalu berubah mengikuti perubahan dari waktu ke waktu sehingga perusahaan harus mengikuti perkembangannya. Usaha perusahaan mengikuti perubahan untuk mendapatkan legitimasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkesinambungan. Proses untuk mendapatkan legitimasi berkaitan dengan kontrak sosial antara yang dibuat oleh perusahaan dengan berbagai pihak dalam masyarakat.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ghazali dan Chariri menjelaskan bahwa yang melandasi teori legitimasi merupakan kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi, Shocker dan Sethi memberikan penjelasan mengenai konsep kontrak sosial sebagai berikut :“Semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial baik eksplisit maupun implisit dimana kelangsungan hidup dan pertumbuhannya didasarkan kepada : 1) Hasil akhir (output) yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang luas. 2) Distribusi manfaat ekonomi, sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan power yang dimiliki”.

Teori legitimasi memfokuskan terhadap interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Dowling dan Pfeffer, memberikan alasan logis mengenai legitimasi organisasi sebagai berikut: “Organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial

masyarakat dimana organisasi merupakan bagian dari sistem tersebut. Selama kedua sistem nilai tersebut selaras, kita dapat melihat hal tersebut sebagai legitimasi perusahaan. Ketika ketidakselarasan aktual dan potensial terjadi diantara kedua sistem tersebut, maka ada ancaman terhadap legitimasi perusahaan”.

Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Maka legitimasi dapat dikatakan sebagai manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup. Ketika ada perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat, legitimasi perusahaan akan berada pada posisi terancam. Perbedaan yang terjadi ini antara nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial masyarakat sering dinamakan ”legitimacy gap” dan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Perusahaan berusaha memonitor nilai-nilai perusahaan dan nilai-nilai sosial masyarakat dan mengidentifikasi kemungkinan munculnya mengenai gap tersebut. Walaupun perlu diingat keberadaan dan besarnya legitimacy gap bukanlah merupakan hal yang mudah untuk ditentukan. Jadi untuk mengurangi legitimacy gap, perusahaan harus mengidentifikasi aktivitas yang berada dalam kendalinya. Adapun cara atau media yang efektif untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat yaitu dengan mempublikasikan CSR yang merepresentasikan tanggung jawab lingkungan dan sosial perusahaan. Perusahaan yang terus berusaha untuk memperoleh legitimasi melalui pengungkapan, berharap pada akhirnya akan terus-menerus eksis.

2.1.2. Teori *Stakeholder*

Stakeholder merupakan keterikatan yang didasari oleh kepentingan tertentu. Dengan demikian, jika berbicara mengenai *stakeholder theory* berarti membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak. Teori *stakeholder* adalah bahwa *stakeholder* merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. *Stakeholder* dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk tanggung jawab dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap *stakeholdernya*.

Dasar dari teori *stakeholder* adalah bahwa semakin kuat hubungan korporasi, maka akan semakin baik bisnis korporasi. Sebaliknya, semakin buruk hubungan korporasi maka akan semakin sulit. Hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan adalah berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama. Teori *stakeholder* adalah sebutan konsep manajemen strategis, tujuannya adalah untuk membantu korporasi memperkuat hubungan dengan kelompok eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif. Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*.

Teori *stakeholder* pada suatu perusahaan diharapkan dapat memberi manfaat bagi *stakeholder*. Manfaat tersebut dapat diberikan dengan cara menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan adanya program tersebut perusahaan diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan, pelanggan dan masyarakat lokal. Sehingga akan dapat terjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan lingkungan

sekitar tempat beroperasi. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut. Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin baik hubungan pada *stakeholder*, maka semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholdernya*.

2.2. Sustainable Development Goals

2.2.1. Pengertian Sustainable Development Goals

Hadiwijoyo dan Anisa, (2019: 42) SDGs merupakan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi serta dapat bersinergi dengan lingkungan. Pada penyusunannya, didasari penuh bahwa inisiatif global ini tidak dapat menampilkan adanya implementasi ditingkat regional dan nasional. SDGs ditingkat regional dan nasional pun perlu meneguhkan kembali semangat dan nilai SDGs yang inklusif dan partisipatif sebagaimana yang telah dibangun dalam SDGs tingkat global. Peran negara sangat krusial dalam memastikan bahwa pelaksanaan SDGs mendasarkan pada pendekatan dan strategi yang holistik antara pembangunan ekonomi, inklusif sosial dan keberlanjutan lingkungan dengan tetap mengedepankan pada karakteristik pada prioritas tiap-tiap negara.

Konsep Sustainable Development Goals (SDGs) itu sendiri lahir pada kegiatan Konferensi mengenai Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Rio de Janeiro tahun 2012. Sustainable Development Goals (SDGs) ini meliputi 4 (empat) dimensi yaitu pembangunan manusia, pembangunan ekonomi,

pembangunan lingkungan dan governance (tata kelola). Hal ini sejalan dengan konsep baru pembangunan yaitu pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) adalah 5P. Pertama, people meliputi prinsip dasar hak asasi manusia, inklusivitas, dan antidiskriminasi. Kedua, planet mencakup prinsip berkelanjutan generasi mendatang. Ketiga, peace berupa prinsip perdamaian dan keadilan. Keempat, prosperity meliputi prinsip kesejahteraan bagi semua. Kelima, partnership mencakup prinsip kerja sama dari semua pemangku kepentingan, pemerintah, komunitas, akademisi, dan dunia usaha. Prinsip ini bahkan juga sudah diadopsi dalam bisnis sehingga menjadi bisnis yang berkelanjutan (sustainability business). Indikator yang ingin dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah memperoleh indikator bersama yang universal yang mampu memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial dan ekonomi sehingga pembangunan diterima secara sosial, ramah terhadap lingkungan, dan menguntungkan secara ekonomi. menjaga keseimbangan tiga dimensi pembangunan tersebut, maka Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki 5 (lima) pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai 3 (tiga) indikator mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Kemiskinan masih menjadi isu penting dan utama, selain dua capaian lainnya. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 (tujuh belas) indikator global yang telah ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai berikut :

Tabel 3. Indikator Global ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

1	2	3
Berkaitan Langsung dengan Kemiskinan		

1.	Tanpa Kemiskinan	Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia
2.	Tanpa Kelaparan	Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan
1	2	3
3.	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak	Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua Orang
4.	Mengurangi Kesenjangan	Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia
Tidak Berkaitan Langsung dengan Kemiskinan		
1.	Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan	Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur
2.	Pendidikan Berkualitas	Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang

3.	Kesetaraan Gender	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan
4.	Air Bersih dan Sanitasi	Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang
5.	Energi Bersih dan Terjangkau	Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya berkelanjutan dan modern untuk semua orang
6.	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi
7.	Keberlanjutan Kota dan Komunitas	Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan
8.	Konsumsi dan Produksi Bertanggungjawab	Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi
9.	Aksi Terhadap Iklim	Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya
10.	Kehidupan Bawah Laut	Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk
1	2	3
		perkembangan pembangunan yang

		berkelanjutan
11.	Kehidupan di Darat	Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemaknaan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati
12.	Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian	Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan
13.	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang Berkelanjutan

Sumber: Data diolah Peneliti (2023)

Menyikapi 17 (tujuh belas) indikator global tersebut, Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan bahwa ambisi dari negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) tersebut hanya akan tercapai jika dunia telah damai, aman, serta menghormati hak asasi manusia bukan di dunia di mana investasi dalam persenjataan dan perang lebih besar sehingga menghancurkan sebagian besar sumber daya yang telah menjadi komitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan. Terdapat 7 (tujuh) alasan mengapa *Sustainable Development Goals* (SDGs) lebih baik daripada *Millenium Development Goals* (MDGs), yaitu :

1. *Sustainable Development Goals* (SDGs) lebih global dalam mengkolaborasikan program-programnya. MDGs sebelumnya dibuat oleh anggota negara *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dan beberapa lembaga internasional. Sementara *Sustainable Development Goals* (SDGs) dibuat secara detail dengan negosiasi internasional yang juga terdiri dari negara berpendapatan menengah dan rendah.
2. Sektor swasta juga akan memiliki peran yang sama, bahkan lebih besar.
3. *Millenium Development Goals* (MDGs) tidak memiliki standar dasar Hak Asasi Manusia (HAM). *Millenium Development Goals* (MDGs) dianggap gagal untuk memberikan prioritas keadilan yang merata dalam bentuk-bentuk diskriminasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yang akhirnya berujung kepada masih banyaknya orang yang terjebak dalam kemiskinan. Sementara *Sustainable Development Goals* (SDGs) dinilai sudah didukung dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih baik.
4. *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah program inklusif 7 (tujuh) target *Sustainable Development Goals*

(SDGs) sangat eksplisit tertuju kepada orang dengan kecacatan, dan tambahan enam target untuk situasi darurat, ada juga tujuh target bersifat universal dan dua target ditujukan untuk antidiskriminasi.

5. Indikator-indikator yang digunakan memberikan kesempatan untuk keterlibatan masyarakat sipil.
6. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dinilai dapat menginspirasi negara-negara di dunia dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs).
7. *Conference of the Parties 21* (COP21) di Paris melahirkan perjanjian global perubahan iklim sebagai kerangka transisi menuju ekonomi dan masyarakat rendah karbon dan memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim adalah salah satu kesempatan untuk maju.

Faktor yang mempengaruhi *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu :

1. Tersedia sumber daya alam (SDA) yang melimpah
2. Sumber daya manusia (SDM) yang sudah mampu di bidang pembangunan
3. Kemampuan penguasaan teknologi
4. Kondisi sosial budaya masyarakat
5. Tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat

2.3. Corporate Social Responsibility

2.3.1 Pengertian *Corporate Social Responsibility*

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. Tanggung jawab sosial merupakan perluasan tanggung jawab perusahaan dari tanggung jawab ekonomi atas pengelolaan dana yang diinvestasikan, yang pelaksanaannya disampaikan melalui laporan keuangan, menjadi perusahaan yang juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang pelaksanaannya disampaikan melalui laporan tanggung jawab sosial. Konsep tanggung jawab keuangan, sosial, dan lingkungan ini dikenal dengan konsep *Triple Bottom Line* (3P: People, Planet, Profit).

Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Praktek kedermawanaan sosial perusahaan dewasa ini mengalami perkembangan pesat sejalan dengan perkembangannya konsep *Corporate Social Responsibility*. Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang disebut *Sustainability Reporting*. *Sustainability Reporting* adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). *Sustainability*

Reporting meliputi pelaporan mengenai ekonomi, lingkungan dan pengaruh sosial terhadap kinerja organisasi. *Sustainability report* harus menjadi dokumen strategik yang berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan peluang *Sustainability Development* yang membawanya menuju kepada core business dan sektor industrinya. Penerapan *Corporate Social Responsibility* dalam perusahaan-perusahaan diharapkan selain memiliki komitmen finansial kepada pemilik atau pemegang saham, tapi juga memiliki komitmen sosial terhadap para pihak lain yang berkepentingan, karena *Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu bagian dari strategi bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Dalam kemajuan industri sekarang, tekanan masyarakat kepada perusahaan agar mereka melakukan pembenahan sistem operasi perusahaan menjadi suatu sistem yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap sosial sangat kuat, perkembangan teknologi dan industri yang pesat menuntut untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sekitar. Untuk itulah maka pertanggungjawaban sosial perusahaan perlu diungkapkan dalam perusahaan sebagai wujud pelaporan tanggung jawab sosial kepada masyarakat,

2.3.2. Pengertian *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Corporate Social Responsibility Disclosure atau pengungkapan merupakan suatu proses penyedia informasi yang dirancang untuk mengemukakan masalah seputar *social accountability*, yang mana secara khas tindakan ini dapat dipertanggungjawabkan dalam media-media seperti laporan tahunan maupun dalam bentuk iklan yang berorientasi sosial. Adapun dampak operasi perusahaan yang dilaporkan dalam pelaporan *Corporate Social Responsibility*.

1. Dampak ekonomi, berkaitan dengan bagaimana operasi perusahaan akan mempengaruhi para pemangku kepentingan dan sistem ekonomi lokal, nasional, dan pada tingkat global.

2. Dampak lingkungan, diantaranya adalah dampak yang diakibatkan oleh pemakaian input produksi, output produksi, yang diakibatkan oleh perusahaan.
3. Dampak sosial, diantaranya berkaitan dengan hak asasi manusia, tenaga kerja, masyarakat, dan tanggung jawab produk.

Hubungan yang ideal antara *profit* (keuntungan), *people* (masyarakat) dan *planet* (lingkungan) adalah seimbang, tidak bisa mementingkan satu elemen saja. Konsep 3P ini dapat menjamin keberlangsungan bisnis perusahaan karena jika suatu perusahaan hanya mengejar keuntungan semata, bisa jadi lingkungan yang rusak dan masyarakat yang terabaikan menjadi hambatan kelangsungan bisnisnya. Dalam melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat, perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan. Pelaporan keuangan yang memberikan informasi tentang lingkungan sebaiknya menjadi dokumen yang bersifat strategis berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan, dan peluang pembangunan berkelanjutan yang membawa perusahaan menuju kepada *core business* dan sektor industrinya.

2.3.3. Landasan Pelaksanaan CSR di Indonesia

Beberapa Peraturan yang terkait dengan CSR di Indonesia diantaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1999 Tentang praktek Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha tidak sehat dan lain sebagainya. Kemudian Peraturan lain yang menjadikan kegiatan CSR yang dahulu bersifat voluntary kini menjadi bersifat mandatory adalah Undang – Undang Republik Indonesia No.19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep -236 /MBU/2003,

Surat Edaran Menteri BUMN No. SE.- 433/MBU/2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Selain Undang-Undang di atas, juga terdapat Undang-Undang Republik Indonesia No 40 tahun 2007, pasal 1 ayat 3 lebih rinci menjelaskan bahwa yang dimaksud CSR adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi korporat, komunitas tempat maupun pada masyarakat umumnya. Selanjutnya, pada pasal 74 ayat 2 menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan dari sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Hal itu juga terdapat pada Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 pada pasal 5 ayat 2 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas, menyebutkan bahwa realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan diperhitungkan sebagai biaya perseroan.

2.3.4. Manfaat *Corporate Social Responsibility*

Perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya dapat dilakukan dengan memberikan perhatian pada lingkungan sekitar dan berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan yang bertujuan untuk memelihara kualitas hidup umat manusia dalam kurun waktu jangka panjang. Bentuk perhatian terhadap masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai macam aktivitas dan kebijakan yang dapat meningkatkan kompetensi di berbagai bidang. Peningkatan kompetensi diharapkan mampu dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh perusahaan diharapkan tidak hanya bertujuan untuk keuntungan jangka pendek saja, tetapi juga jangka panjang, yaitu memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan

lingkungan sekitar. Manfaat yang diperoleh dari aktivitas *Corporate Social Responsibility* dilihat dari sisi perusahaan, yaitu:

1. Mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima perusahaan.
2. *Corporate Social Responsibility* dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis.
3. Keterlibatan dan kebanggaan karyawan. Karyawan akan merasa bangga bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi yang baik, yang secara konsisten melakukan upaya-upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kebanggaan ini pada akhirnya akan menghasilkan loyalitas sehingga mereka merasa lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras demi kemajuan perusahaan. Hal ini akan berujung pada peningkatan kinerja dan produktivitas.
4. *Corporate Social Responsibility* yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan para stakeholde

2.3.5 Indikator Kinerja pada Pengungkapan CSR GRI 3.0.

Menurut GRI (*Global Reporting Initiative*) yang merupakan sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah mempelopori perkembangan dunia, dan paling banyak menggunakan kerangka laporan keberlanjutan dan berkomitmen terus-menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia. Mengungkapkan adanya tiga fokus pengungkapan *corporate social responsibility* menurut GRI (*Global Reporting Initiative*) versi 3.0. yakni indikator Kinerja Ekonomi (*economic performance indicator*) yang terdiri dari 9 item, indikator Kinerja Lingkungan (*environment performance indicator*) yang terdiri dari 30

item, dan indikator Kinerja Sosial (*social performance indicator*) yang terdiri dari 40 item, yakni sebagai berikut:

Tabel 2.1

Indikator Pengungkapan Tanggung Jawab
Sosial GRI versi 3.0

<u>Indikato</u>	
• Aspek Kinerja Ekonomi	
EC1	Perolehan dan distribusi nilai ekonomi langsung, meliputi pendapatan, biaya operasi, imbal jasa karyawan, donasi, dan investasi komunitas lainnya, laba ditahan, dan pembayaran kepada ana serta pemerintah.
EC2	Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan iklim serta
EC3	Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan pasti.
EC4	Bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah.
• Aspek Kehadiran Pasar	
EC5	Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan dengan upah minimum
EC6	Kebijakan, praktek, dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada lokasi operasi yang signifikan.
EC7	Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen senior local
• Aspek Dampak Tidak Langsung	
EC8	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur serta jasa yang
EC9	Pemahaman dan penjelasan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan,

Indikator Kinerja Lingkungan	
• Aspek Material	
EN1	Penggunaan Bahan; diperinci berdasarkan berat atau volume
EN2	Persentase Penggunaan Bahan Daur Ulang
• Energi	
EN3	Penggunaan Energi Langsung dari Sumberdaya Energi Primer
EN4	Pemakaian Energi Tidak Langsung berdasarkan Sumber Primer
EN5	Penghematan Energi melalui Konservasi dan Peningkatan
EN6	Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien atau energi yang dapat diperbarui, serta pengurangan persyaratan kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif tersebut.
EN7	Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan pengurangan

• Air	
EN8	Total pengambilan air per sumber
EN9	Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat
EN10	Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan
• Biodiversitas (Keanekaragaman Hayati)	
EN11	Lokasi dan Ukuran Tanah yang dimiliki, disewa, dikelola oleh organisasi pelapor yang berlokasi di dalam, atau yang berdekatan dengan daerah yang diproteksi (dilindungi) atau daerah-daerah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah yang diproteksi

EN12	Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas, produk, dan jasa organisasi pelapor terhadap keanekaragaman hayati di daerah yang diproteksi (dilindungi) dan di daerah yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang diproteksi (dilindungi)
EN13	Perlindungan dan Pemulihan Habitat
EN14	Strategi, tindakan, dan rencana mendatang untuk mengelola dampak terhadap
EN15	Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko kepunahan yang masuk dalam daftar Merah IUCN (IUCN Red List Species) dan yang masuk dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di daerah-daerah yang terkena dampak operasi
• Emisi, Efluen dan Limbah	
EN16	Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung maupun tidak langsung
EN17	Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci
EN18	Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan
EN19	Emisi bahan kimia yang merusak lapisan ozon (ozone-depleting substances/ODS) diperinci berdasarkan berat
EN20	NO _x , SO _x dan emisi udara signifikan lainnya yang diperinci berdasarkan

EN21	Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan
EN22	Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode pembuangan
EN23	Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan
EN24	Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah yang dianggap berbahaya menurut Lampiran Konvensi Basel I, II, III dan VIII, dan persentase limbah yang diangkut secara

EN25	Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai keanekaragaman hayati badan air serta habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembuangan dan limpasan air organisasi
• Produk dan Jasa	
EN26	Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa dan sejauh
EN27	Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik menurut
• Kepatuhan	
EN28	Nilai Moneter Denda yang signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter atas
• Transportasi	
EN29	Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta material yang digunakan untuk operasi perusahaan, dan tenaga kerja yang
• Keseluruhan	
EN30	Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan
K	
Aspek Kinerja penting yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, hak asasi manusia,	
• Ketenagakerjaan	
• Aspek Pekerjaan	
LA1	Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak

	Wilayah
LA2	Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut kelompok usia, jenis
LA3	Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (purna waktu) yang tidak disediakan bagi karyawan tidak tetap (paruh waktu) menurut kegiatan pokoknya.
• Aspek: Tenaga kerja / Hubungan Manajemen	
LA4	Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar-menawar kolektif
LA5	Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan kegiatan penting, termasuk apakah hal itu dijelaskan dalam perjanjian
• Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Jabatan	
LA6	Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili dalam panitia Kesehatan dan Keselamatan antara manajemen dan pekerja yang membantu memantau dan memberi nasihat untuk program keselamatan dan kesehatan jabatan.
LA7	Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari yang hilang, dan ketidakhadiran, dan jumlah kematian karena
LA8	Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/bimbingan, pencegahan, pengendalian risiko setempat untuk membantu para karyawan, anggota keluarga dan anggota masyarakat,
LA9	Masalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi
• Aspek: Pelatihan dan Pendidikan	
LA10	Rata-rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan menurut kategori/kelompok
LA11	Program untuk pengaturan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat yang menjangkau kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu mereka dalam mengatur akhir
LA12	Persentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan

	karier secara teratur.
• Aspek: Keberagaman dan Kesempatan Setara	
LA13	Komposisi badan pengelola/penguasa dan perincian karyawan tiap kategori/kelompok menurut jenis kelamin, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan keanekaragaman
LA14	Perbandingan/rasio gaji dasar pria terhadap wanita menurut
• Hak Asasi Manusia	
• Aspek: Praktek Investasi dan Pengadaan	
HR1	Persentase dan jumlah perjanjian investasi signifikan yang memuat klausul HAM atau telah menjalani proses skrining/filtrasi terkait dengan aspek hak asasi manusia.
HR2	Persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang telah menjalani proses
HR3	Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan dalam hal mengenai kebijakan dan serta prosedur terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi, termasuk persentase
• Aspek: Nondiskriminasi	
HR4	Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan yang
• Aspek: Kebebasan Berserikat dan Berunding Bersama	
HR5	Segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang diidentifikasi dapat menimbulkan risiko yang signifikan serta tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak
• Aspek: Pekerja Anak	
HR6	Kegiatan yang identifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan terjadinya kasus pekerja anak, dan langkah-langkah yang diambil untuk mendukung upaya
• Aspek: Kerja Paksa dan Kerja Wajib	

HR7	Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat
-----	---

	telah diambil untuk mendukung upaya penghapusan kerja paksa atau kerja
• Aspek: Praktek/Tindakan Pengamanan	
HR8	Persentase personel penjaga keamanan yang terlatih dalam hal kebijakan dan prosedur organisasi terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi
• Aspek: Hak Penduduk Asli	
HR9	Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk asli dan langkahlangkah yang diambil.
• Masyarakat	
• Aspek: Komunitas	
S01	Sifat dasar, ruang lingkup, dan keefektifan setiap program dan praktek yang dilakukan untuk menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, baik pada saat memulai, pada saat
• Aspek: Korupsi	
S02	Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko
S03	Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur
S04	Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi.
• Aspek: Kebijakan Publik	
S05	Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses melobi dan pembuatan kebijakan publik.
S06	Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai politik, politisi, dan
• Aspek: Kelakuan Tidak Bersaing	
S07	Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan antipersaingan, anti-

• Aspek: Kepatuhan	
S08	Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter untuk
Tanggung Jawab Produk	

Aspek: Kesehatan dan Keamanan Pelanggan	
PR1	Tahapan daur hidup di mana dampak produk dan jasa yang menyangkut kesehatan dan keamanan dinilai untuk penyempurnaan, dan persentase dari kategori produk dan jasa yang penting yang harus mengikuti prosedur tersebut
PR2	Jumlah pelanggaran terhadap peraturan dan etika mengenai dampak kesehatan dan keselamatan suatu produk dan jasa selama daur hidup, per produk.
• Aspek: Pemasangan Label bagi Produk dan Jasa	
PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur dan persentase produk dan jasa yang signifikan yang terkait dengan informasi yang dipersyaratkan tersebut.
PR4	Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes mengenai penyediaan
PR5	Praktek yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan termasuk hasil survei
• Aspek: Komunikasi Pemasaran	
PR6	Program-program untuk ketaatan pada hukum, standar dan voluntary codes yang terkait dengan komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship.
PR7	Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes sukarela mengenai komunikasi pemasaran termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship, menurut produknya.
• Aspek: Keleluasaan Pribadi (privacy) Pelanggan	

PR8	Jumlah keseluruhan dari pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran
• Aspek: Kepatuhan	
PR9	Nilai moneter dari denda pelanggaran hukum dan peraturan mengenai

Sumber: Global Reporting Initiative (GRI) Index versi 3.0

2.4. Kinerja Lingkungan

2.4.1. Pengertian Kinerja Lingkungan

Konsep kinerja lingkungan mengarah pada jumlah kerusakan lingkungan yang timbul akibat kegiatan bisnis. Dampak kerusakan lingkungan yang lebih sedikit akan meningkatkan kinerja lingkungan. Sebaliknya, semakin besar dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan bisnis, maka semakin buruk kinerja perusahaan (Putri et al., 2019b). Kinerja lingkungan merupakan pencapaian perusahaan dalam mengelola interaksi antara aktivitas, produk dan jasa yang terdapat pada perusahaan dengan aktivitas lingkungan perusahaan (Bennett et al., 2000). Kinerja lingkungan merupakan hasil yang dapat diukur dari system manajemen lingkungan, yang berkaitan dengan control aspek-aspek lingkungannya. Pengkajian kinerja lingkungan didasarkan pada kebijakan lingkungan, sasaran lingkungan dan target lingkungan (ISO 14001). (Lober, 1996) mengemukakan sebuah matriks yang meyajikan kerangka kerja bagi organisasi untuk mengukur kinerja lingkungan ke dalam empat dimensi. Pertama, dimensi proses internal, yaitu organizational system; menjelaskan karakteristik struktur dan program perusahaan, termasuk kebijakan tertulis, mekanisme pengendalian internal, komunikasi, hubungan terhadap public, peltihan dan insentif. Kedua, dimensi proses eksternal yaitu hubungan dengan stakeholder; terkait hubungan dengan stakeholder seperti karyawan, pelanggan, dan lain-lain. Ketiga, dimensi outcome internal yaitu kepatuhan terhadap peraturan; terkait kepatuhan atau pelanggaran terhadap hukum dan regulasi serta denda yang

dibayarkan. Keempat, dimensi outcome eksternal yaitu pengaruh lingkungan; menggambarkan pencapaian hasil yang lebih nyata dan dapat dihitung seperti tingkat polusi, limbah yang di hasilkan perusahaan, limbah yang diolah, dan lainnya.

(Bahri & Cahyani, 2016) Variabel kinerja lingkungan dapat diukur oleh perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja (PROPER) yang diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Penilaian kinerja lingkungan menurut PROPER antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penilaian Kinerja Lingkungan Menurut PROPER

No	Peringkat	Keterangan
1.	Emas	Untuk usaha dan/atau aktivitas yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan Bertanggung jawab terhadap masyarakat.
2.	Hijau	Untuk usaha dan/atau aktivitas yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang telah dipersyaratkan dalam peraturan melalui pelaksanaan system pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien dan melakukan upaya tanggung jawab social dengan baik.
	Biru	Untuk usaha dan/atau aktivitas yang telah melakukan upaya

3.		pengelolaan lingkungan yang telah dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4.	Merah	Upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan.
5.	Hitam	Untuk usaha dan/atau aktivitas yang dengan sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau yang tidak melaksanakan sanksi administratif.

Sumber : Buku PROPER Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

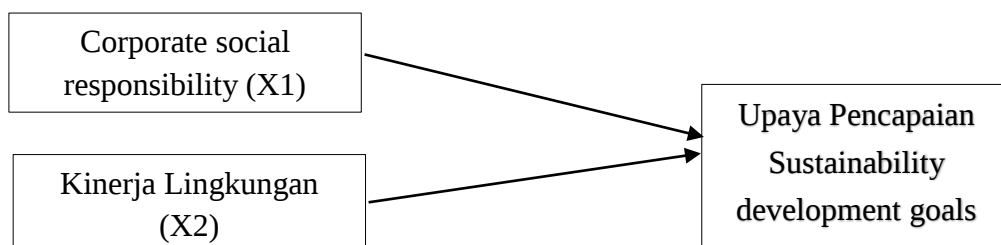
2.4.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	M. Gasalli, M. Syafrizal (2018)	Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dalam upaya pencapaian Sustainable Development Goals	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y.
2.	Hadih Fitriah (2018)	Corporate Social Responsibility. Akuntansi dan Implementasi Ajaran Tauhid dalam menghadapi Era Sustainable	Akuntansi dan Implementasi Ajaran Tauhid berpengaruh terhadap Sustainable Development Goals

		Development Goals	
3.	Meilany Budiarti Santoso, Santoso Tri Raharjo (2021)	Di Skursus Corporate Social Responsibility dalam mewujudkan Sustainable Development Goals	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR berpengaruh terhadap SDGs
4.	Jihan Humaira (2023)	Implementasi Program Corporate Social Responsibility dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif signifikan terhadap SDGs
5.	M. Reza (2019)	Corporate Social Responsibility Multinational Corporations di Indonesia, sudahkah mendukung Sustainable Development Goals	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility Multinational Corporations tidak berpengaruh terhadap SDGs

2.5. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam telaah pustaka, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:



2.6. Bangunan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap upaya pencapaian Sustainable Development Goals

SDGs merupakan tujuan global yang direncanakan untuk mengatasi permasalahan yang sangat krusial didunia, salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan memiliki dimensi yang kompleks, tidak hanya permasalahan ekonomi semata, tetapi juga politik, sosial dan budaya yang saling berhubungan satu sama lain.

Sustainable Development Goals memiliki 17 tujuan yang harus dipenuhi untuk mencapai kemaslahatan manusia. Kesejahteraan masyarakat dapat terealisasi apabila kebutuhan material, spriritual, dan sosial individu dapat terpenuhi. Untuk mencapai tujuan SDGs tersebut maka dapat dilakukan dengan program pemberdayaan masyarakat salah satunya CSR yang dilakukan oleh perusahaan.

H₁: Pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap pencapaian SDGs

2.6.2. Pengaruh Kinerja Lingkungan dengan upaya pencapaian Sustainable Development Goals

Kinerja lingkungan merupakan pencapaian perusahaan dalam mengelola interaksi antara aktivitas, produk dan jasa perusahaan dengan lingkungan (Burhany, 2013). Jika diamati 17 tujuan SDGs mencakup seluruh aspek kegiatan manusia di bumi. Salah satunya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan perubahan yang positif dan berwawasan lingkungan (Warlina, 2017). Pembangunan keberlanjutan yang berkaitan dengan wawasan lingkungan perlu dilakukan dan diperhatikan untuk mengetahui keadaan lingkungan dengan melakukan analisis terhadap dampak lingkungan akibat aktifitas perusahaan, sehingga pembangunan keberlanjutan

bukan hanya mensejahterahkan ekonomi saja tetapi efek dari kerusakan lingkungan juga dapat teratasi (Warlina, 2017).

Berkaitan dengan upaya pencapaian tujuan pembangunan keberlanjutan kinerja lingkungan perusahaan bisa berpengaruh sebagai langkah upaya pencapaian SDGs. Karena dengan pelaksanaan kinerja lingkungan yang baik setiap perusahaan berarti mendukung tercapainya salah satu aspek terpenting dalam pembangunan keberlanjutan yaitu kinerja lingkungan itu sendiri. Kinerja lingkungan yang baik jika persentase limbah sebelum dibuang diolah terlebih dahulu sehingga dapat mengurangi dampak lingkungan sekitar perusahaan seperti emisi gas rumah kaca dengan hal itu tujuan pembangunan keberlanjutan dapat tercapai sesuai dengan pilar. SDGs yaitu pembangunan lingkungan hidup (Burhany, 2013; (Hadiwijoyo, & Anisa, 2019:43).

Komitmen pemerintah untuk mengurangi gas rumah kaca yang salah satunya diakibatkan oleh operasional perusahaan. Melalui pengungkapan kinerja lingkungan yang baik bukan hanya sebagai tanggung jawab perusahaan atas tindakan operasionalnya saja namun juga sebagai langkah untuk membantu pemerintah menanggulangi pemanasan global yang merupakan tujuan SDGs ke 13 yaitu memerangi perubahan iklim (Anggraeni, 2015).

H₂ : Kinerja Lingkungan berpengaruh positif terhadap pencapaian SDGs